

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau istilah lainnya dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan hasil pengesahan dari Konferensi Tingkat Tinggi PBB pada tahun 2015 yang dihadiri oleh 193 negara termasuk Indonesia. TPB menjadi rancangan agenda bersama kegiatan lanjutan pembangunan global dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. KTT pembangunan berkelanjutan PBB menegaskan bahwa SDGs akan berlaku dari 2015 hingga 2030 dan dirancang menjadi universal yang berlaku bagi semua segmen masyarakat baik di negara berkembang maupun negara maju. (Santoso, 2019)

Dengan adanya agenda pembangunan global TPB, pemerintah Indonesia telah berperan serta dalam menyukkseskan capaian TPB tersebut. Komitmen pemerintah dalam pencapaian TPB adalah menyelarkannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Mulai dari sesi perumusan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian sampai pelaporan, TPB/ SDGs dijadikan sebagai referensi dalam pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah. (Kementrian PPN/ BAPPENAS, 2017a)

Menurut Keiner dalam (dalam Nurlita 2017:8) Pembangunan berkelanjutan merupakan situasi kehidupan bermartabat yang memiliki keterkaitan dengan HAM dalam rangka membangun dan mempertahankan pencapaian kehidupan yang lebih baik. Prinsip yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan ialah keadilan antara generasi masa kini dengan generasi yang akan datang dalam hal menjaga serta melestarikan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan. (Pertiwi, 2017)

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang berlandaskan pada

keberlangsungan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masa kini maupun masa mendatang.

Terkait perihal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana target-target nasional telah ditetapkan dan dijadikan pedoman untuk digunakan oleh departemen atau lembaga terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan serta penilaian Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB, serta dijadikan pedoman bagi penduduk lokal dalam persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Yulianto, 2019)

RAN dan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berarti menguatkan masyarakat lokal yang damai, inklusif serta menguatkan kemitraan. Kesempatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan kontribusi dan partisipasi dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non-pemerintah, sehingga diharapkan mampu mempercepat pencapaian target tahun 2030. Langkah percepatan pencapaian target tersebut awal mulanya dengan melokalkan SDGs global menjadi SDGs Nasional kemudian pelokalan berlanjut menjadi level provinsi dan kabupaten. (Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2017a)

Dalam menindak lanjuti pelokalan SDGs yang dilatar belakangi dengan Perpres No. 59 Tahun 2017, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengeluarkan Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. (PERMENDESA, 2020) Dalam Permendesa ini, SDGs Desa dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya dan regulasi ini menekankan pada perbaikan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 yang masih mewarnai permasalahan global pada tahun 2021 di Indonesia.

Adapun Sustainable Development Goals ini terdiri dari 17 tujuan yang didalamnya terdapat 169 target serta 319 indikator, sementara untuk tujuan SDGs

Desa terdapat satu butir tambahan tujuan. Dengan demikian SDGs Desa ini memiliki 18 butir tujuan yang tercakup menjadi pilar ekonomi, social, lingkungan, hukum dan tata Kelola secara terintegrasi. (Santoso, 2019)

Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan TPB tersebut, pelokalan SDGs telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di kecamatan Paseh yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung. Pemerintah daerah Kecamatan Paseh telah menjalankan program SDGs Desa pada tahun 2021 yang dalam cakupan wilayahnya terdapat 12 desa diantaranya yaitu Desa Cipaku, Drawati, Cigentur, Loa, Sindangsari, Sukamantri, Cijagra, Cipedes, Karangtunggal, Mekarpawitan, Sukamanah, dan Desa Tangsimekar. Desa-desa tersebut telah memanfaatkan SDGs Desa sebagai sarana pembangunan desa yang berada di Kecamatan Paseh. Berikut ini adalah tabel capaian tujuan SDGs Desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung :

 Capaian Keseluruhan 100 %					
1 DESA TANPA KEMISKINAN	Capaian 10 %	2 DESA TANPA KELAPARAN	Capaian 5 %	3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA	Capaian 15 %
4 PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS	Capaian 4 %	5 KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA	Capaian 2 %	6 DESA LAYAN AIR BERSIH DAN SANITASI	Capaian 3 %
7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERDAPILAH	Capaian N/A	8 PERUBAHAN EKONOMI DESA MERATA	Capaian 8 %	9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN	Capaian 40 %
10 DESA TANPA KESENJANGAN	Capaian 10 %	11 MINGGILAH PERUMAHAN DESA AMAN DAN WISATA	Capaian 1 %	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA BERKELANJUTAN	Capaian 1 %
13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM	Capaian 3 %	14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT	Capaian N/A	15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT	Capaian 4 %
16 DESA DAMAI BERKEADILAN	Capaian N/A	17 KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA	Capaian N/A	18 BELMAGALAN DESA SIKAP DAN BUDAYA DESA AMPUN	Capaian N/A

Gambar 1.1 Pencapaian Tujuan SDGs Desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021 (Diolah peneliti 2021)

No.	Tujuan	Program	Persentase capaian (100%)
1.	Desa Tanpa Kemiskinan	BLT/ Bantuan Langsung Tunai	10%
2.	Desa Tanpa Kelaparan	BPNT/ Bantuan Pangan Non-Tunai	5%
3.	Kehidupan Masyarakat Desa yang Sehat dan Sejahtera	Penanganan Stunting dan Covid-19	15%
4.	Pendidikan Desa Berkualitas	Pelatihan Skill	4%
5.	Keterlibatan Perempuan Desa	Insentif Kader Posyandu	2%
6.	Desa dengan Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	Pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih	3%
7.	Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	Tidak ada program	-
8.	Pertumbuh kembangan Ekonomi Desa yang Merata	Permodalan Bumdes	2%
9.	Inovasi, industri dan Infrastrktur Desa Sesuai dengan Kebutuhan	Pembangunan Infrastruktur	40%
10.	Desa Tanpa Kesenjangan	Padat Karya Tunai	10%
11.	Pemukiman Desa Aman dan Nyaman	Rumah Sehat	1%
12.	Produksi dan Konsumsi Desa Sadar Lingkungan	Penanganan Sampah	1%
13.	Desa yang Responsif akan Perubahan Iklim	Kebencanaan	3%
14.	Desa yang Peduli akan Lingkungan Laut	Tidak ada program	-
15.	Desa yang Peduli akan Lingkungan Darat	Drainase/ Irigasi	4%
16.	Desa Damai dan Berkeadilan	Tidak ada program	-

17.	Kemitraan dan Pembangunan Desa	Tidak ada program	-
18	Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif	Tidak ada program	-

Tabel 1.1 Pencapaian Tujuan SDGs Desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021

Sumber : Tujuan-tujuan SDGs diambil dari (Kementrian PPN/ BAPPENAS, 2017b). Program dan Persentase capaian merupakan hasil penelitian yang diolah peneliti, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 13 program SDGs Desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yang telah terealisasi, namun masih terdapat lima program yang belum terealisasi. Penyebab tidak terealisasinya beberapa program SDGs Desa ini adalah faktor lingkungan yang tidak sesuai dengan tujuan program dan belum menjadi prioritas program desa di RPJMDes. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh salah satu pendamping desa yang melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 12 desa di wilayah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Program-program SDGs Desa dalam pencapaian pelaksanaannya dilakukan pertimbangan dengan kriteria visi-misi desa yang bersangkutan, regulasi-regulasi terkait SDGs Desa, musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan.(Wawancara tanggal 12 November 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Paseh)

Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah pada besarnya persentase capaian program seperti yang tertera pada tabel 1.1 Pencapaian Tujuan SDGs Desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Pada program pembangunan infrastruktur memiliki 40% capaian program yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase program lainnya. Pada program penanganan stunting dan Covid-19 yang masih menjadi permasalahan global pada tahun 2021 mendapatkan 15% capaian program, sedangkan program yang menjadi prioritas program pemulihan ekonomi desa yaitu Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya

Tunai memiliki 10% capaian program dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memiliki 5% capaian program. Seperti yang telah dipaparkan di atas, prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020, dalam pelaksanaannya menekankan pada perbaikan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 yang masih mewarnai permasalahan global.

Maka dari itu, metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan metode yang tepat untuk mengukur skala prioritas program SDGs Desa di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan metode AHP, pengukuran skala prioritas program SDGs Desa dapat ditentukan dengan mengikutsertakan responden, menyediakan opsi kriteria yang berkaitan dengan program TPB serta menyediakan penilaian skala terhadap kriteria yang tersusun dalam suatu kuesioner sehingga pengukuran dengan metode AHP ini dapat memberikan hasil optimal dalam mengukur skala prioritas program SDGs Desa kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Pada dasarnya, metode AHP merupakan Sistem Penunjang Keputusan (SPK) yang diciptakan oleh Thomas L. Saaty. SPK dengan Metode AHP ini dapat menyelesaikan permasalahan yang memiliki banyak faktor atau kriteria-kriteria yang rumit kemudian membentuk sebuah susunan hirarki. Menurut Saaty, susunan hirarki diartikan sebagai representasi dari suatu permasalahan yang tergolong rumit dalam sebuah struktur multi level dimana level pertama adalah goals/ tujuan, kemudian berjenjang menjadi level kriteria, sampai level alternatif. Dengan demikian, suatu permasalahan akan terlihat lebih sistematis dan terstruktur. (Samosir et al., 2021)

Berdasarkan uraian diatas mengenai besaran persentase yang telah dicapai terkait program SDGs Desa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “*Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Mengukur Prioritas Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2021*”.

B. Identifikasi Masalah

1. Tidak meratanya persentase capaian program TPB di Kecamatan Paseh.
2. Capaian persentase program infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan dengan program-program TPB/ SDGs lainnya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung terkait prioritas program SDGs Desa. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Metode analisis yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP)
2. Objek penelitian difokuskan pengukurannya pada 5 (lima) Program TPB/ SDGs yang mendapat capaian hasil terbesar, yaitu :
 - 1) Goal 1 : Desa Tanpa Kemiskinan
 - 2) Goal 2 : Ketahanan Pangan Desa
 - 3) Goal 3 : Desa Sehat dan Sejahtera
 - 4) Goal 9 : Infrastruktur Desa
 - 5) Goal 10 : Desa Tanpa Kesenjangan
3. Lingkup penelitian hanya meninjau kriteria yang mempengaruhi prioritas program TPB/ SDGs di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung yaitu Visi – Misi, Regulasi, Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan, tetapi tidak membahas seberapa jauh pengaruhnya terhadap program TPB/ SDGs di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
4. Penelitian ini melibatkan beberapa responden ahli yang relevan dengan penelitian yang dapat mendeskripsikan capaian program TPB/ SDGs di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

D. Rumusan Masalah

1. Apa kriteria yang dijadikan pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas program TPB di Kecamatan Paseh ?
2. Apa prioritas program SDGs Desa paling tinggi dengan menggunakan metode *Analytical hierarchy Process* ?

E. Tujuan Penelitian

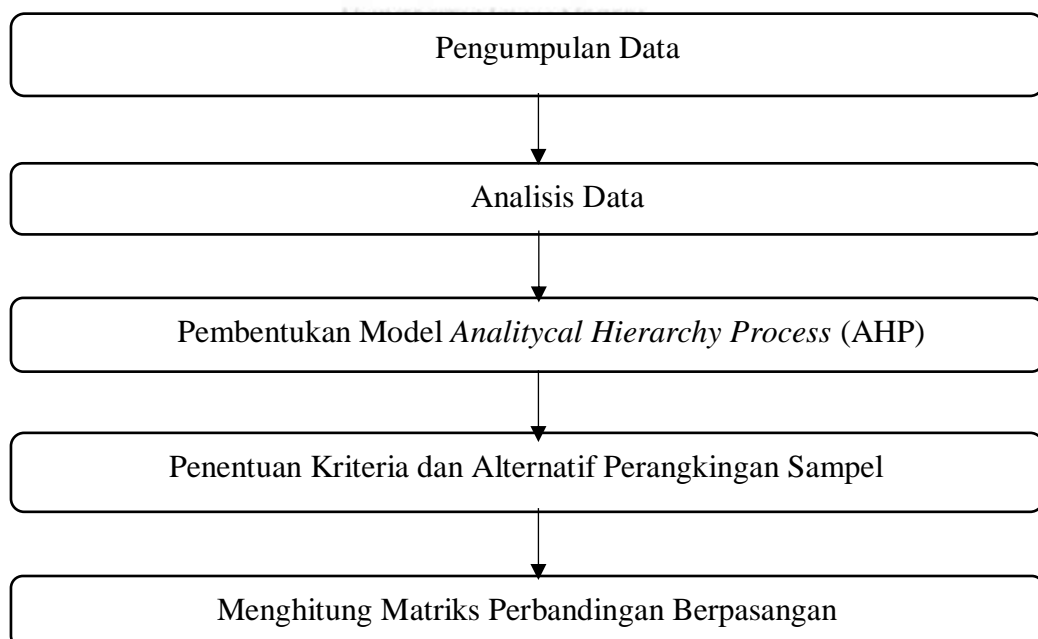
1. Untuk mengetahui kriteria yang dijadikan pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas program SDGs Desa di Kecamatan Paseh.

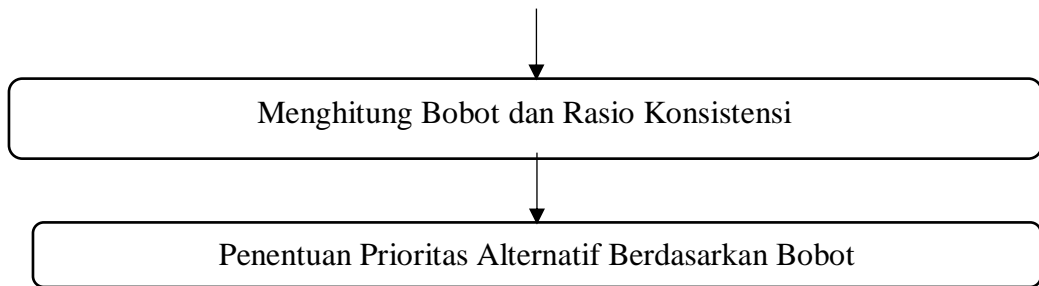
2. Untuk mengetahui prioritas program SDGs Desa paling tinggi dengan menggunakan metode *Analytical hierarchy Process*.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - 1.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan informasi serta memperluas pemahaman mengenai pengukuran skala prioritas program TPB/ SDGs.
 - 1.2 Sebagai bahan pengembangan intelektual peneliti di bidang kebijakan sektor publik terlebih sebagai pengetahuan mengenai pertimbangan terkait perumusan kebijakan para pemangku kepentingan.
2. Praktis
 - 2.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir peneliti mengenai Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan publik.
 - 2.2 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya dengan ranah yang sama secara lebih rinci dan mendalam.

G. Kerangka Pemikiran





Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Pemikiran, 2022

Kegiatan awal dalam menyelesaikan penelitian ini dilakukan dengan menentukan perangkaan sampel kriteria dan alternatif selanjutnya data akan dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada *stakeholder* Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan dilakukan pembentukan model *analytical hierarchy process* dengan bantuan *software expert choice 11* serta akan dianalisis perhitungan matriks perbandingan berpasangan dengan menghitung bobot dan rasio konsistensi. Langkah terakhir yaitu akan dilakukan penentuan prioritas alternatif berdasarkan bobot.